

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Boedi Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya)*. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 2009. *Asta Kosala Kosali, Asta Bhumi, Eka Prathama, Dharma Kahuripan*. Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bali. Bali.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- M. Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Noor Said. 2019. *Dinamika Penduduk*. ALPRIN. Semarang.
- Muhammad Arfah Pattenreng. 2019. *Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah (Suatu Kajian Komprehensif)*. Bosowa Publishing Group. Makassar.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ni Made Sukrawati. 2019. *Acara Agama Hindu*. UNHI Press. Bali.
- Rafael Edy Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. ELSAM. Jakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok
- Soerjono Soekanto 2005. *Hukum Adat Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

----- 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soedharyo Soimin. 2008. *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*. Sinar Grafika

Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.

Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Kencana, Jakarta.

Umar Said Sugiharto, dkk.. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah*. Setara Press. Malang.

Urip Santoso. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

----- 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta

----- 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana. Jakarta.

### **Undang-Undang dan Peraturan Sejenis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap. MPR No. IV/MPR/1978

Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Surat Menteri dalam Negeri SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.520.1/2252 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di seluruh Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pnj/KEM-ATR/BPN/11/2019 tentang Penunjukan Perkumpulan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Transmigrasi dan Koperasi Nomor 91 Tahun 1973/No. 77 Kpts/Men/1973

### **Artikel dalam Jurnal dan Majalah**

A.A Gede Bagus. "Multikulturalisme di Pura Besakih Karangasem". Forum Arkeologi .Vol. 25. No. 3. November 2012.

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoso. "Pariwisata dan Tanah Laba Pura: Ancaman dan Tantangan". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undikhsa. Vol. 9. No. 2. Mei 2021.

Cokorda Gede Ramaputra, dkk. "Larangan Menjual Hak Atas Tanah Laba Pura Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Bali".

WICAKSANA, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. Vol. 3. No. 1. Maret 2019.

I Ketut Wartayasa. Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 1. Nomor 2. September 2018.

Ida Bagus Nyoman Trisya Andika, dkk.. Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura Sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 2. No. 1. Januari 2021.

Ida Bagus Putu Eka Suadnyana. "Teknik Komunikasi Prajuru Adat dalam Pelaksanaan Upacara Piodalan di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Kutri Kabupaten Gianyar". COMMUNICARE. Vol. 3. No. 1. Juli 2022.

Iriani. "Hubungan Disasosiatif di Permukiman Transmigrasi Sukamaju". Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 4. Nomor 2. 2018.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I. 2015. *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Noor Amitasari, dkk. Potret Kehidupan Masyarakat Transmigrasi Bali di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Prabayaksa: Journal of History Education, Vol.1 No. 1. Maret 2021.

Putu DIPA Satria Dana, dkk. Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura di Bali (Inkonsistensi Norma Dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1963), e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4. No. 2. 2021.

Rahmat Ramadhani. 2021. Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II oleh Para Penggarap. SINTESA.

Thamrin Mattulada. Sejarah "Perekatan Perbedaan Perbedaan (Transmigran Orang Bali di Kabupaten Mamuju)". Walasuji. Volume 8. No. 1. Juni 2017.

Wika Hardika Legiani, dkk. Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan).

Jurnal Hermeneutika. Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta. Vol. 4. No. 1. Mei 2018.

Wayan Padet, Ida Bagus Wika Krishna. Falsafah Hidup Dalam Konsep Tri Hita Karana. GENTA HREDDAYA. Vol. 2. No. 2. September 2018.

### Internet

Admin Kubutambahan. "Sejarah Adanya Pura Kahyangan Tiga di Bali" 16 Maret 2016 <https://kubutambahan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sejarah-adanya-pura-khayangan-tiga-di-bali-59>. Diakses pada tanggal 12 September 2022 Pukul 08.55 WITA.

Baruga Pelayanan Masyarakat, Kabupaten Luwu Utara, <https://sulselprov.go.id/pages/deskab/10>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 11.51 WITA.

Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Timur, "Mengulas Singkat Pengertian Transmigrasi", Selasa, 23 Juli 2019 <https://disnakertrans.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-178-mengulas--singkat-pengertian-transmigrasi.html>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 13.00 WITA.

I Made Suwasthawa. "Fungsi "Kahyangan Tiga" dalam Desa Adat" <https://phdi.or.id/artikel.php?id=fungsi-kahyangan-tiga-dalam-desa-adat>. Diakses pada tanggal 12 September Pukul 08.57.

Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Profil Desa Sukamaju <https://sukamaju.luwuutarakab.go.id/page/56/profil-desasukamaju.html> Diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 13.30 WITA

Kecamatan Sukamaju. Profil Wilayah Kecamatan Sukamaju, <https://sukamaju.luwuutarakab.go.id/page/3/letak-geografis.html> Diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 13.04 WITA.

Luwuutarakab.go.id. Sejarah. <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/sejarah>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 12.56 WITA.

Oki Pratama, Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia#:~:text=Terbentang%20dari%20Sabang%20hingga>

[%20Merauke,juta%20km2%20yang%20berupa%20daratan.](#)  
Diakses pada tanggal 5 April 2022 Pukul 13.17 WITA.

Parisada Hindu Dharma Indonesia. “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” <https://phdi.or.id/page.php?id=anggaran>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2022 Pukul 08.29 WITA.

Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Gerokgak, “Pengertian Panca Yadnya, Bagian-Bagiannya, Beserta Contohnya”, 16 April 2019 <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-panca-yadnya-bagian-bagiannya-beserta-contohnya-79#:~:text=Panca%20sendiri%20memiliki%20makna%20lima,saja%20syarat%2Dsyarat%20dari%20yadnya%20>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WITA.

Tata Ruang Provinsi Bali. “Kahyangan atau Hyang atau Pura” 12 September 2022, <https://tarubali.baliprov.go.id/kahyangan-atau-hyang-atau-pura/> Diakses pada 12 September 2022 Pukul 08.50 WITA.